

**ANALISA RASIO APBD
SEBAGAI SALAH SATU ALAT UNTUK MENILAI
KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
(STUDI KASUS PADA PEMERINTAH KABUPATEN
MOJOKERTO)**

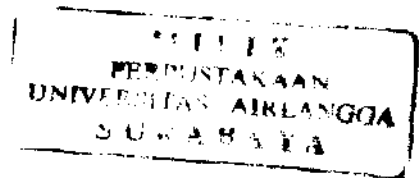
SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN
DALAM MEMPEROLEH GELAR SARJANA EKONOMI
JURUSAN AKUNTANSI**

KE

A 79 / 102

F01
2



DIAJUKAN OLEH :
VISTA ROSYIDA
No. Pokok : 040023257-E

**KEPADA
FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2002**

SKRIPSI

**ANALISA RASIO APBD
SEBAGAI SALAH SATU ALAT UNTUK MENILAI
KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
(STUDI KASUS PADA PEMERINTAH KABUPATEN
MOJOKERTO)**

DIAJUKAN OLEH :

VISTA ROSYIDA

No. Pokok : 040023257-E

TELAH DISETUJUI DAN DITERIMA DENGAN BAIK OLEH

DOSEN PEMBIMBING,



Dra. ISNALYTA, M.Si, Ak.

TANGGAL ...7-03-2003...

KETUA PROGRAM STUDI,



Drs. M. SUYUNUS, MAFIS, Ak.

TANGGAL ...7-03-2003...

ABSTRAK

Dalam era reformasi keuangan daerah ditandai dengan pelaksanaan otonomi daerah. Untuk merealisasikannya Pemerintah Pusat mengeluarkan berbagai peraturan, diantaranya PP No. 105/2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah. Dalam pasal 4 PP No. 105/2000 menegaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatuhan.

Pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Mojokerto yang merupakan objek penelitian adalah hasil perkembangan APBD pada tahun anggaran 1996/1997 - 2001. Sedangkan teknik analisa yang digunakan untuk menilai kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah adalah analisa rasio APBD.

Dilihat dari pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Mojokerto yang dituangkan dalam APBD, maka dapat dinilai kinerjanya berdasarkan hasil perhitungan rasio APBD sehingga dapat diketahui bahwa kemandirian Pemerintah Kabupaten Mojokerto relatif rendah (tahun anggaran 2001 sebesar 4,72%), Tingkat efektivitas dan efisiensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) cukup baik, tingkat keserasian antara belanja rutin dengan belanja pembangunan masih diprioritaskan pada belanja rutin (tahun anggaran 2001 sebesar 72%), aktivitas penyerapan dana per triwulan pada tahun anggaran 2001 untuk belanja pembangunan masih terkonsentrasi pada triwulan IV sebesar 61,34% dari total anggaran pembangunan, melihat DSCR diatas 2,5 (sebesar 539,19) maka Pemerintah Kabupaten Mojokerto diperbolehkan mengadakan pinjaman kepada pihak ekstern dan yang terakhir tingkat pertumbuhan APBD Kabupaten Mojokerto dinilai cukup baik meskipun dari sisi pos PAD perlu mendapat perhatian.